



Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan

(Studi Kasus di Kota Tanjungpinang Kelurahan Sei Jang)

Fauziah Sandy^{1*}, Rintaria², Putri Kesuma Ningrum³

¹⁻³Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

*Penulis korespondensi: fauziahfauziah458@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty, with a case study focus on Sei Jang Village, Tanjungpinang City. PKH is a social assistance program initiated by the government to improve the welfare of the poor through conditional cash assistance. The reason the researcher chose this title was to determine the extent to which PKH is effective in reducing poverty, especially since data shows a decline in the number of PKH recipients in Sei Jang Village in 2023. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, where data is obtained through in-depth interviews, observation, and documentation studies. To measure the level of effectiveness, the theory from (Makmur, 2015) was used, which states that the elements of effectiveness include accuracy in timing, accuracy in calculation, accuracy in measurement, accuracy in decision making, accuracy in thinking, accuracy in carrying out orders, accuracy in determining goals, and accuracy in targeting. The results of the study show that PKH has had a positive impact on reducing the economic burden on poor families, particularly in meeting the educational and health needs of children. However, the effectiveness of this program is still hampered by several factors, such as delays in fund disbursement, participants' lack of understanding of the program's terms and conditions, and minimal assistance from relevant officials. In addition, another challenge in the form of inaccuracy in targeting beneficiaries also affects the overall achievement of the program. These findings indicate that better management and supervision are urgently needed. This study concludes that although PKH contributes significantly to poverty alleviation, improvements in management and supervision are needed to maximize the program's objectives. The proposed recommendations include increasing the capacity of social workers, improving the beneficiary selection mechanism, and strengthening coordination among stakeholders at the local level.*

Keywords: *Effectiveness; Sei Jang Village; Poverty; Family Hope Program; Tanjungpinang.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan, dengan fokus studi kasus di Kelurahan Sei Jang, Kota Tanjungpinang. PKH merupakan salah satu program bantuan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan tunai bersyarat. Alasan peneliti mengambil judul ini adalah untuk mengetahui sejauh mana PKH efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama karena data menunjukkan adanya penurunan jumlah penerima PKH di Kelurahan Sei Jang pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk mengukur tingkat efektivitas menggunakan teori dari (Makmur, 2015), unsur-unsur efektivitas antara lain, Ketepatan penentuan waktu, Ketetapan perhitungan, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam penentuan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan Menentukan tujuan, Ketepatan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban ekonomi keluarga miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman peserta mengenai syarat dan ketentuan program, serta minimnya pendampingan dari petugas terkait. Selain itu, tantangan lain berupa ketidaktepatan sasaran penerima manfaat juga mempengaruhi capaian program secara keseluruhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik sangat diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PKH berkontribusi signifikan dalam menanggulangi kemiskinan, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek pengelolaan dan pengawasan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas pendamping sosial, penyempurnaan mekanisme seleksi penerima manfaat, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Efektivitas; Kemiskinan; Kelurahan Sei Jang; Program Keluarga Harapan; Tanjungpinang.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam teori pembentukan Negara. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Sukmana (2016), Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar atas kemajuan kesejahteraan rakyat termasuk dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang selalu dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Masalah kemiskinan ini termasuk masalah yang cukup penting dan sangat terintegrasi untuk di tindak lanjuti, karena terkait ke dalam masalah kemanusiaan. Kemiskinan ini sudah ada sejak masa penjajahan berlangsung, bahkan hingga sekarang masih belum di temukannya sebuah rumusan ataupun formula dalam penanganan kemiskinan yang sempurna ataupun jitu dalam mengatasi penyebab kemiskinan. Sehingga harus secara terus menerus perlu dikembangkan. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melalui implementasi program pemberdayaan ekonomi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di berbagai daerah, termasuk ke daerah pelosok.

Tabel 1. Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan Berdasarkan Kecamatan/Kelurahan di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2023.

Kecamatan/Kelurahan	2020	2021	2022	2023
Kec. Bukit Bestari	1062	1287	874	746
Dompak	139	158	75	70
Sei Jang	275	301	152	121
Tanjung Unggat	366	427	349	301
Tanjung Ayun Sakti	132	198	163	136
Tanjungpinang Timur	150	203	135	118

Sumber : Open Data Tanjungpinang 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa di antara enam kelurahan di Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Sei Jang memiliki fluktuasi jumlah penduduk yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah penerima mencapai 275 orang, meningkat menjadi 301 orang pada tahun 2021, tetapi menurun drastis menjadi 152 orang pada tahun 2022 dan 121 orang pada tahun 2023. Penurunan ini cukup signifikan dibandingkan kelurahan lainnya, yang menunjukkan dinamika unik di wilayah ini. Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang membuat peneliti tertarik untuk

memilih Kelurahan Sei Jang sebagai lokasi penelitian, guna menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah ini.

Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau juga menghadapi hal yang serupa. Angka kemiskinan tersebut juga terhitung masih cukup tinggi. Pada tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang mencapai jumlah sebanyak 12.386 KK. Dan setelah dikurangi dengan data anomali, berkurang menjadi 6.290 KK. Berbagai macam program sosial dari pemerintah daerah Kota Tanjungpinang di kerahkan untuk mengentas angka kemiskinan di tahun 2022 hingga pertengahan 2023, angka kemiskinan dapat turun secara signifikan menjadi 564 KK (Susanto, 2023). Presentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang tercatat di BPS pada tahun 2023 sebesar 7,95 persen, dan menurun pada tahun 2022 sebesar 1,90 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 berkisar 17,67 ribu orang, lalu menurun pada tahun 2022 sekitar 4 ribu orang. Garis Kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp771.584-/kapita/bulan, meningkat sebesar Rp7.174,- terhadap tahun 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 1,18, turun 0,46 poin terhadap tahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 0,33, turun 0,11 poin terhadap tahun 2022 (Statistik, 2023).

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut Kementerian Sosial (2021), Program Keluarga Harapan, yang sering disingkat dengan "PKH", adalah salah satu program perlindungan sosial yang memberikan bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat keluarga miskin yang menerima bantuan ini.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin dan rentan, serta menumbuhkan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam hal mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (Kementerian Sosial, 2021).

Tabel berikut menunjukkan rincian kriteria komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang terdiri dari tiga elemen: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. Rincian kriteria komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial).

Aspek Kesehatan	Aspek Pendidikan	Aspek Kesejahteraan
ibu yang sedang hamil atau menyusui serta anak-anak usia dini dengan rentang usia 0-6 tahun.	Anak-anak antara usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dan memiliki tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTS, atau SMA/MA.	Penyandang disabilitas yang berusia 70 tahun ke atas.

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021.

Keluarga yang menerima bantuan program sosial memiliki hak untuk menerima bantuan sosial, pendampingan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta program bantuan tambahan dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset properti, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai dapat dibandingkan untuk mengetahui seberapa efektif upaya tersebut. Namun, jika pekerjaan dilakukan dengan cara yang salah, sehingga tujuan tidak tercapai atau tidak efektif. Efektivitas dapat diukur dengan cara berikut: ketepatan dalam penentuan waktu, ketepatan dalam perhitungan, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam pilihan, ketepatan dalam berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan dalam mencapai sasaran (Makmur, 2015).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun penelitian Terdahulu yang pernah dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini pada tahun 2018 berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH telah dilaksanakan secara optimal dari sudut pandang perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PKH telah menyebabkan perubahan perilaku dan kemandirian peserta PKH dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Kedua, penelitian deskriptif kualitatif dengan purposive selection of informants berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dilakukan oleh Nurul Najidah dan Dra. Hesti Lestari pada tahun 2019. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa PKH belum sepenuhnya efektif dalam setiap kriteria, seperti ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, dan ketepatan biaya. Koordinasi, perencanaan, dan ketepatan layanan adalah faktor penghambat keefektifan PKH.

Ketiga, Baiq Rizka Milania Ulfah (2023), dalam penelitian asosiatif kuantitatif berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tiwugalih Kota Praya. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Ulfah menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya. Memiliki persamaan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif Program Keluarga Harapan dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi KPM PKH. Perbedaan dalam penelitian ini termasuk perubahan pada tipe dan pendekatan penelitian, indikator efektivitas, dan subjek penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami gejala atau fenomena sosial dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang gejala atau fenomena sosial tersebut dan kemudian menghasilkan teori. Shofiah, 2020, menyatakan Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil yang telah dirasakan penduduk Kota Tanjungpinang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk mengurangi kemiskinan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian **mengenai** efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sei Jang, Kota Tanjungpinang, mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki alasan yang beragam dalam menilai keberhasilan atau kekurangan dari program ini. Melalui wawancara dengan sejumlah informan penerima manfaat PKH, peneliti mendapati jawaban yang bervariasi.

Meskipun begitu, maksud dari jawaban yang diberikan oleh informan pada umumnya memiliki inti yang hampir sama. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dijelaskan secara rinci berdasarkan indikator yang digunakan oleh peneliti, yakni Ketepatan penentuan waktu, Ketetapan perhitungan, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam penentuan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan Menentukan tujuan, Ketepatan sasaran.

Ketepatan Penentuan Waktu

Masyarakat Kelurahan Sei Jang menunjukkan berbagai tanggapan terkait dengan ketepatan waktu pencairan bantuan PKH. Sebagian besar penerima manfaat mengungkapkan bahwa bantuan seringkali datang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Keterlambatan ini menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi keluarga yang bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok. Warga mengharapkan agar pencairan bantuan dapat lebih tepat waktu agar mereka dapat merencanakan pengeluaran keluarga dengan lebih baik.

Namun, ada pula sebagian penerima yang merasa bahwa meskipun ada keterlambatan, mereka tetap merasa bantuan ini cukup membantu mereka dalam jangka pendek, terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan dan pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, ketepatan waktu pencairan bantuan menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

“Biasanya Udah ada info dari atas, kemensos bahwa kalau udah ada pencairan tahap 2, langsung Dibsampaikan di dinas kota dan pendamping PKH. Jadi di sampaikan oleh dinas kota bahwa ini kami mau cair dan biasanya pendamping PKH yang menyampaikan ke penerima PKH dan di sampaikan ke lokasi seperti ke bank atau ke ATM mereka masing-masing, dan bantuan itu dalam bentuk uang.”

Dan Ibu Nia juga menjawab:

“Ada dong karna kadang-kadang kayak mungkin karena Sei Jang masih dalam satu daratan. Jadi kalau ada info masih tau dan tau lokasi penerima kalau kayak pulau-pulau kadang komunikasi agak susah jadi biasanya paling kendalanya kalau ada penerima baru mereka harus cari dulu alamatnya dan pokoknya di kasi tau takutnya warga itu tidak ada di tempat itu aja sih sebenarnya. Warga penerima tersebut pulang kampung atau kemana jadi agak susah. Kami biasanya di kabari, mereka biasa ada grup jadi kabari atau datang ke rumahnya langsung sih.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengukuran ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat di daerah tersebut umumnya sudah dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terstruktur. Setiap tahap pencairan bantuan sosial, seperti pencairan tahap 2, biasanya sudah diinformasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Dinas Kota dan pendamping PKH. Setelah itu, pendamping PKH menyampaikan informasi kepada penerima manfaat, termasuk jadwal dan lokasi pencairan bantuan, yang biasanya dilakukan di bank atau ATM yang telah ditentukan.

Namun, meskipun sistem komunikasi dan penyaluran bantuan sudah cukup terorganisir, terdapat beberapa kendala dalam menjaga ketepatan waktu penyaluran. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam mengakses lokasi penerima bantuan, terutama bagi mereka yang berada di daerah dengan kondisi geografis yang lebih terpencil, seperti di pulau-pulau atau daerah dengan akses terbatas. Komunikasi dengan penerima baru sering kali menjadi tantangan, karena alamat penerima yang harus dicari terlebih dahulu atau adanya kemungkinan bahwa penerima bantuan tidak berada di tempat yang terdaftar, misalnya karena pulang kampung atau bepergian.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak terkait biasanya memanfaatkan grup komunikasi, seperti grup WhatsApp, untuk menyampaikan informasi terkait pencairan atau perubahan jadwal. Selain itu, untuk memastikan bantuan tepat waktu diterima, pendamping PKH juga melakukan kunjungan langsung ke rumah penerima jika diperlukan. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya upaya dari pihak penyalur bantuan untuk menjaga ketepatan waktu dan memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat dapat menerima bantuan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang Tokoh Masyarakat mengenai Ketepatan Penentuan Waktu dalam penyaluran PKH diperoleh jawaban:

“Sering, kadang-kadang 1 bulan, ibu kan udah lama dapatnya dari tahun ke tahun”

Berdasarkan hasil wawancara, penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sering mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan, dengan frekuensi keterlambatan yang kadang-kadang mencapai satu bulan. Meskipun telah menerima bantuan secara berkelanjutan setiap tahun, masalah keterlambatan ini tetap menjadi kendala yang dirasakan oleh penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni selaku Pendamping PKH.

“Ini kita jelaskan dulu ya, PKH itu terimanya kalau pakai gesek ya itu dua bulan sekali mulai berlakunya di tahun 2013. Kemarin eh 2003-2023 Nah itu mulai dua bulan sekali kalau yang dulu tiga bulan sekali kalau soal terlambatan murah saya dapat bu Bapak tolong cek duitnya ya ada duitnya mereka Gesek mereka langsung dapat itu yang ini tanya lagi Bapak kawan tuan tersebut selalu datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengukuran ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat di daerah tersebut umumnya telah berjalan sesuai prosedur yang jelas dan terstruktur. Penyaluran bantuan dilakukan dua bulan sekali, sesuai kebijakan yang berlaku sejak tahun 2013. Prosesnya diawali dengan pemberitahuan dari Kementerian Sosial kepada Dinas Kota dan pendamping PKH, yang

kemudian menyampaikan informasi kepada penerima manfaat mengenai jadwal dan lokasi pencairan bantuan. Lokasi pencairan biasanya di bank atau ATM yang telah ditentukan.

Keterlambatan pencairan bantuan jarang terjadi, karena penerima manfaat diarahkan untuk memeriksa saldo dan melakukan pencairan sesuai jadwal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penerima manfaat secara umum hadir tepat waktu sesuai jadwal pencairan yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran bantuan berjalan lancar

Ketepatan Perhitungan

Ketepatan dalam perhitungan bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat juga menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Beberapa informan menyatakan bahwa meskipun mereka menerima bantuan secara rutin, jumlah yang diberikan terkadang tidak memadai untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Selain itu, ada anggapan bahwa perhitungan jumlah bantuan tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Ketidaktepatan dalam perhitungan bantuan ini menurunkan tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap program PKH, yang seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Beberapa penerima berharap agar pemerintah dapat lebih mempertimbangkan faktor kebutuhan masing-masing keluarga dalam perhitungan bantuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

“Iya biasanya ada rekonsiliasi tapi tahun ini belum ada ya biasanya bintang dari Kabupaten kota ada rekap ada laporan setiap penyaluran jadi berapa yang sudah salur dan yang tidak disalurkan apa masalah itu ada pihak pihak yang tidak di temukan ada warganya tidak ada. Ada tabelnya masing masing. Ada laporannya tiga bulan.”

Dan Ibu Nia juga menjawab:

“Ya itu biasanya laporan dari pendamping setiap penyaluran nanti ada rekapan. Nanti tau sendiri kendala nya apa ada dilapangan rekapan disetiap ada laporan dari dinas PKH itu berapa yang sudah disalurkan itu jadi itu aja sih laporannya jadi laporan itu langsung ke pusat biasanya. Jadi emang data penerima PKH itu memang direkap semua.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengukuran ketepatan perhitungan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada rekonsiliasi dan pelaporan yang dilakukan secara rutin. Setiap tahapan penyaluran bantuan selalu disertai dengan rekapitulasi dari tingkat Kabupaten/Kota, yang mencatat jumlah bantuan yang telah disalurkan dan yang belum dapat disalurkan. Rekap ini mencakup informasi tentang penerima yang sudah mendapatkan bantuan serta alasan kenapa

ada penerima yang tidak dapat menerima bantuan (misalnya, karena tidak dapat ditemukan atau sedang tidak ada di tempat).

Proses pengumpulan dan analisis data untuk memastikan ketepatan perhitungan dilakukan melalui laporan bulanan yang disusun oleh pendamping PKH. Setiap kali ada penyaluran bantuan, pendamping mencatat segala informasi terkait penerima, kendala yang dihadapi di lapangan, serta jumlah bantuan yang berhasil disalurkan. Rekapitan tersebut kemudian dikirimkan ke Dinas PKH dan diteruskan ke pihak pusat. Laporan ini juga mencakup evaluasi mengenai masalah yang ditemukan di lapangan, seperti penerima yang tidak hadir atau masalah lainnya yang menghalangi penyaluran bantuan.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun proses pelaporan dan rekonsiliasi dilakukan dengan baik, masih ada tantangan dalam menemukan penerima yang tidak dapat dihubungi atau yang berada di lokasi yang sulit dijangkau. Data yang diperoleh dari laporan dan rekapitan ini sangat penting untuk perbaikan dan pengembangan program PKH di masa mendatang, karena memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penyaluran serta permasalahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan penyaluran bantuan.

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang Tokoh Masyarakat mengenai Ketepatan Penentuan Waktu dalam penyaluran PKH diperoleh jawaban:

“sesuai, sesuai aje, hehe, di sesuaikan lahhh, hehe, ibu dapat baru ini, kadang keluar 600 , bulan kemarin 800, itupun tidak tentu”

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial umumnya dianggap sesuai oleh penerima manfaat. Namun, terdapat ketidakpastian dalam jumlah bantuan yang diterima, di mana terkadang jumlahnya Rp600.000, dan pada bulan lainnya bisa mencapai Rp800.000. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.

Ketepatan dalam Pengukuran

Pengukuran yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana PKH dapat diukur dalam memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Berdasarkan wawancara, sebagian masyarakat merasa bahwa meskipun mereka menerima bantuan, dampak dari PKH terhadap peningkatan taraf hidup mereka tidak terlalu terasa. Mereka merasa bahwa program ini hanya memberikan bantuan sementara tanpa adanya perubahan besar dalam kehidupan mereka, seperti peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak atau perbaikan kondisi ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa informan juga mengungkapkan bahwa pengukuran keberhasilan program PKH yang hanya dilihat dari jumlah penerima bantuan tidak

cukup menggambarkan perubahan yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan keluarga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

"Untuk mengukur efektivitas itu kita harus punya rekapan data yaitu laporan dari tinjauan bantuan jadi hanya itu disalurkan. Komunikasi dengan tiga arah setiap menyalurkan dan dengan penerima bantuan jadi kita tau masalah dilapangan itu apa yaitu kenapa lambat disalurkan itu ada buku tabungan belum selesai Atau kartu ATM hilang yaitu sih permasalahan-permasalahannya."

Dan Ibu Nia juga menjawab:

"kalau itu tergantung dari masyarakatnya ya tergantung ada perubahan atau engga, karena kalau memang bantuan itu sangat membantu karena memang kadang-kadang bantuan PKH itu buat janda, lansia, dan keluarga yang punya anak yang masih sekolah jadi itu sangat membantu pendidikan anak itu dan untuk kehidupan ekonomi dan kalau anaknya sudah berhasil bisa membantu kehidupan ekonomi. jadi dengan sekolah anak-anak itu terbantuan, dan lansia juga tidak ada yang bisa bekerja, jadi dikasih bantuan PKH per 3 bulan sekali sebesar 300 ribu."

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa indikator ketepatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sei Jang, Tanjungpinang. Salah satunya adalah rekapan data dan laporan penyaluran bantuan yang mencakup informasi mengenai apakah bantuan disalurkan tepat waktu atau ada kendala di lapangan. Selain itu, komunikasi yang baik antara pihak penyalur bantuan, penerima, dan instansi terkait menjadi indikator penting untuk mengetahui kendala yang terjadi selama proses penyaluran. Kendala yang sering muncul di lapangan, seperti buku tabungan yang belum selesai atau kartu ATM yang hilang, juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyaluran bantuan.

Mengenai sejauh mana indikator ketepatan ini dapat mencerminkan perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat, hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak dari PKH dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, meskipun pengaruhnya sangat bergantung pada kondisi masyarakat penerima itu sendiri. Dalam jangka pendek, bantuan PKH terutama sangat membantu untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak, yang mana membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga yang memiliki anak sekolah, serta bagi keluarga dengan lansia yang tidak dapat bekerja. Bantuan sebesar 300 ribu rupiah per tiga bulan tersebut memberikan sedikit peningkatan pada kehidupan ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan.

Namun, dalam jangka panjang, perubahan kondisi ekonomi keluarga sangat bergantung pada kemampuan keluarga untuk memanfaatkan bantuan dengan baik, seperti memastikan anak-anak menyelesaikan pendidikan mereka dan memperoleh pekerjaan yang layak. Jika anak-anak berhasil mendapatkan pendidikan yang baik, mereka bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga di masa depan. Oleh karena itu, meskipun bantuan PKH memberikan dampak positif, keberlanjutannya sangat bergantung pada faktor-faktor internal keluarga, seperti kemauan untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kemampuan untuk mengelola bantuan dengan bijak.

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang Tokoh Masyarakat mengenai Ketepatan Penentuan Waktu dalam penyaluran PKH diperoleh jawaban:

“Menurut ibu kurang sih, kan ibu janda, ga punya suami, dah tua lagi , tapi kan kite bersyukur aje, apa aja kn yg udh di kasih”

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa masyarakat merasa bahwa bantuan yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, ada juga yang menganggap jumlah bantuan masih kurang, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi sulit, seperti janda tanpa penghasilan tetap.

Ketepatan dalam Penentuan Pilihan

Ketepatan dalam penentuan pilihan berkaitan dengan kesesuaian antara penerima manfaat dan program PKH itu sendiri. Dalam hal ini, beberapa keluarga penerima merasa bahwa mereka telah memilih untuk mengikuti program PKH karena merasa bahwa bantuan yang diberikan akan sangat membantu. Namun, ada juga yang merasa bahwa pilihan mereka untuk terdaftar dalam PKH bukanlah keputusan yang sepenuhnya tepat, karena tidak semua keluarga benar-benar membutuhkan bantuan tersebut atau ada keluarga yang merasa tidak mendapat dampak yang signifikan. Penting bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan keluarga yang layak menerima bantuan agar program ini benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

“Sebenarnya Kita tidak ada program pelatihan ya. Karna kita Kita cuman ada rekon data per 3 bulan. Jadi rekon data itu memang sangat berpengaruh jadi permasalahan itu kita atasi, kita cari permasalahannya dimana dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi berpengaruh sih sama kondisi belakangan, dengan 3 soal dalam tingkat penyaluran. Jadi ketika ada masalah kita langsung kembangkan bagaimana mencari solusi bisa kita bantu masyarakat itu. Jadi kayak ekonomi saat ini di pulau-pulau itu kan masalahnya kan ga semua kuncinya cuma 300 ribu warga sehingga warga harus pergi ke pelaksanaan itu. Solusinya

biasanya kita suruh orang-orang yang turun ke rumah rumah warga jadi kami siapkan dari RT RW disini, jadi pak RW yang bekerja sama dengan bank jadi warga yang jauh jauh tidak perlu jauh jauh lagi mengambil bantuan itu.”

Dan Ibu Nia juga menjawab:

“Pkh itu dibantukan untuk janda, yang masih memiliki anak sekolah, lansia dan disabilitas, biasanya kalo mendaftarkan PKH itu harus masuk data di DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial). Indikator warga miskin itu berarti masyarakat miskin, jadi ada syarat syarat nya sih untuk masuk DTKS itu, rumahnya, penghasilannya, dan memang biasanya tidak punya penghasilan. Jadi setiap kelurahan itu mempunyai pendamping PKH masing-masing. Setiap kelurahan jadi bisa disampaikan ke pendamping mungkin, bisa dibantu untuk penghasilannya ke kelurahan disampaikan ke pak RT aja sih dari proses paling awal itu dan nanti dimasukkan ke dinsos kabupaten kota bukan di provinsi. Nanti di DTKS kabupaten kota baru disuruh untuk ke kementerian bisa juga dapat aplikasi kebansos itu bisa diusulkan ke situ, itu biasanya penghasilan mandiri itu biasanya ada syarat syaratnya disitu. Kalau apa saja kriteria seleksi penerimaan warga PKH itu dilakukan bagaimana, Seleksinya bagaimana, nanti seperti kalau memang masih punya anak usia sekolah yang memang perlu dibiayai itu bisa dibilang sama lansia dan disampaikan ke pak RT nanti ada konstruksi regulasinya dari kabupaten kota. Jadi anak anak usia sekolah yang mau ambil KIP nanti bisa di usulkan saja masukan KTP, KK, Foto rumah, yang tidak masuk DTKS, masukkan lagi pagi ke DTKS sampaikan ke sekolah juga bisa bantu. Tetapi tidak juga nanti diseleksi sampai ada yang kurang lalu kita ajukan ke atas, tapi kalau mau lebih cepat sebenarnya bisa lewat pos”

Berdasarkan hasil wawancara, pengaruh program pelatihan dan sosialisasi terhadap ketepatan dalam penentuan penerima manfaat PKH tidak secara langsung terlihat, karena program pelatihan tidak diselenggarakan. Sebagai gantinya, proses rekonsiliasi data yang dilakukan setiap tiga bulan menjadi langkah penting dalam memastikan ketepatan penerima manfaat. Proses ini membantu mengidentifikasi permasalahan yang muncul, seperti kendala geografis atau keterbatasan akses penerima manfaat, serta mencari solusi yang efektif.

Salah satu solusi yang diterapkan adalah kolaborasi dengan RT/RW dan pihak bank, sehingga warga yang tinggal di wilayah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk menerima bantuan. Langkah ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pihak terkait, seperti RT/RW, bank, dan masyarakat, untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran bantuan. Pendekatan ini secara tidak langsung mendukung ketepatan waktu dan sasaran program, meskipun tanpa adanya pelatihan khusus.

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang Tokoh Masyarakat mengenai Ketepatan Penentuan Waktu dalam penyaluran PKH diperoleh jawaban:

“engga juga, kan PKH ni di khusus kan hanye untuk org yg tidak mampu, kalo org yg mampu, itu tak dapat, dulu kan ibu di damping oleh dinas sosial, tak, udh di lanjutkan same ibu murni, selaku pendamping yg di sini”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap cukup efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan di daerah tersebut. Namun, beberapa masyarakat berpendapat bahwa program ini lebih dikhususkan untuk kalangan yang kurang mampu, sehingga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak dapat mengaksesnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni selaku Pendamping PKH.

“Alhamdulillah kita mau ngomong ya beliau tuh kemarin dicari juga berarti memang kita yang pendampingnya harus mencari belion nggak tahu kalau dia tuh, terima apa tidak itu sekali udah terima kita jelasin bahwa ini adalah penerima bantuan banyak belion bilang udah lama nih memang melalui pos dari bulan Juni Nina sampai sekarang belum itu kenapa? karena kemarin informasinya akan dialihkan ke Bank Himbarah yang seperti itu yang dapat melalui GC tadi rencananya cuma seperti itu, tapi ya kita kan gak tau ya, ternyata ya prosesnya. mungkin masih lama, akhirnya beliau-beliau ini akan dialihkan lagi ke pos pengambilannya insya Allah ya dalam bulan ini”

Dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH menghadapi tantangan dalam memastikan penerima bantuan menerima haknya dengan lancar. Pendamping sering kali harus melakukan pencarian terhadap penerima bantuan yang tidak selalu mengetahui status penerimaan bantuan mereka. Salah satu contoh yang disebutkan adalah ketika seorang penerima bantuan belum menerima bantuan selama berbulan-bulan, meskipun informasi sebelumnya sudah diberikan. Pendamping menjelaskan bahwa proses pencairan bantuan terkadang mengalami perubahan, seperti rencana awal yang dialihkan ke Bank Himbarah, namun akhirnya dialihkan kembali ke pos pengambilan. Hal ini menyebabkan proses menjadi lebih lama dan memerlukan perhatian lebih dari pendamping agar bantuan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Meskipun demikian, pendamping berkomitmen untuk memastikan bahwa penerima tetap mendapatkan bantuan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan direncanakan dalam bulan ini untuk menyelesaikan pengalihan tersebut.

Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir dalam konteks ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang tujuan dan manfaat dari program PKH. Beberapa penerima manfaat memiliki pandangan positif terhadap PKH dan percaya bahwa program ini dapat membantu mengurangi kemiskinan di keluarga mereka. Namun, ada juga yang menganggap bahwa PKH tidak akan bisa mengubah kondisi sosial ekonomi mereka dalam jangka panjang. Ketepatan berpikir ini menjadi penting karena memengaruhi seberapa besar tingkat partisipasi dan rasa percaya masyarakat terhadap keberlanjutan program PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

“Proses Pengambilan keputusan PKH itu juga bisa cuma tetap ada usulan dari kita lagi tetap memutuskan itu dari atas, sebenarnya lewat pengambilan PKH bisa cuma mereka tetap membuat usulan diatas.”

Berdasarkan wawancara, proses pengambilan keputusan dalam menentukan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sei Jang melibatkan usulan dari bawah, namun keputusan akhir tetap diputuskan oleh pihak yang lebih tinggi. Pendamping menjelaskan bahwa meskipun ada usulan dari bawah, proses ini masih melibatkan pengambilan keputusan dari atas yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan prioritas dan kondisi masyarakat yang lebih luas.

Meskipun demikian, proses ini telah berupaya mencerminkan keadilan dan ketepatan sasaran. Namun, ada tantangan dalam memastikan bahwa setiap usulan yang diajukan dapat sepenuhnya mencerminkan kebutuhan penerima manfaat yang sesungguhnya, mengingat adanya tahap penyaringan dan seleksi yang melibatkan pihak yang lebih tinggi.

Dengan demikian, meskipun ada usaha untuk mencapai keadilan dan ketepatan sasaran, proses tersebut masih memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa keputusan benar-benar dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang Tokoh Masyarakat mengenai Ketepatan Penentuan Waktu dalam penyaluran PKH diperoleh jawaban:

“oo masyarakat ye, ye bersyukur lahhh”

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Sei Jang, mayoritas masyarakat mengapresiasi Program Keluarga Harapan (PKH) karena memberikan bantuan yang membantu meringankan beban ekonomi. Namun, mereka juga menyadari bahwa proses seleksi penerima manfaat masih memerlukan perbaikan, karena ada beberapa tantangan dalam memastikan keadilan dan ketepatan sasaran. Meskipun ada usulan dari masyarakat bawah,

keputusan akhir masih ditentukan oleh pihak yang lebih tinggi, yang sering kali mempertimbangkan berbagai faktor prioritas dan kondisi masyarakat yang lebih luas.

Meskipun demikian, masyarakat merasa bersyukur dengan adanya program ini dan berharap proses yang ada dapat terus ditingkatkan agar bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Ketepatan dalam melakukan perintah mengacu pada apakah masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam program PKH, seperti menghadiri pertemuan, memeriksakan kesehatan, dan menyekolahkan anak. Beberapa penerima manfaat mengikuti peraturan dengan baik dan memanfaatkan bantuan untuk kepentingan yang sesuai, namun ada juga yang mengabaikan ketentuan tersebut. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengawasan dan bimbingan yang lebih intensif agar PKH dapat memberikan dampak yang maksimal dalam mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

“Iya, kita gak dapat memastikan itu jugak. Kalau untuk intruksi dari atas mereka semua sama jadi biasanya gak ada masalah.”

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Sei Jang terkait hambatan dalam pelaksanaan instruksi atau perintah dari program PKH, mayoritas menjelaskan bahwa mereka jarang menghadapi masalah. Sebagian besar mengungkapkan bahwa instruksi yang berasal dari pihak yang lebih tinggi biasanya sudah jelas, sehingga tidak menimbulkan hambatan yang signifikan. Namun, meskipun demikian, ada kemungkinan kecil tantangan yang muncul dalam proses implementasi di tingkat bawah, yang mungkin memerlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa setiap instruksi dapat diterapkan dengan baik.

Dalam hal ini, meskipun telah ada upaya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program, tetap diperlukan pemantauan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul, guna menjaga efektivitas program PKH di tingkat masyarakat.

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang Tokoh Masyarakat mengenai Ketepatan Penentuan Waktu dalam penyaluran PKH diperoleh jawaban:

“belum lahh , heheh, kan ibu ni kan punye cucu yg masih sekolah sd, jadi ibu blum merase tercukupi”

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, banyak yang mengungkapkan bahwa mereka masih merasa belum sepenuhnya tercukupi, terutama bagi yang memiliki tanggungan seperti anak sekolah. Mereka menyatakan bahwa meskipun bantuan telah diberikan, kebutuhan

masih dirasakan cukup besar, terutama dalam menghadapi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, meskipun program sudah dirasakan bermanfaat, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni selaku Pendamping PKH.

“Bu Bapak ini dapat informasi beliau dapat PKH itu dari pendamping Kenapa dari pendamping? Karena data beliau itu ada di data pendamping yang di mana beliau itu belum pernah ngambil uangnya makanya beliau baru tahu kalau beliau ini penerima PKH, dan yang keduanya beliau ini tahu kok tiba-tiba saya dapat PKH nggak tahu ternyata beliau ini didata ya Pak RW waktu itu hanya beliau nggak tahu siapa yang data karena kan sekarang nih pendataan itu kan banyak ya bisa dari BPS Bisa dari Kelurahan Bisa dari Pak RT Bisa jadi beliau begini Pak RT, sekali-sekali waktu itu Tolonglah Pak, saya mau Apa ya, surat Keterangan tak mampu Untuk anak saya masuk SMA, Nah, di situ Pak RT Buatlah nih surat Keteranganannya nak Ke Kelurahan, dan pelurahan buat nih langsung terdeteksi kalau beliau ini mengusulkan untuk mendapatkan bantuan salah satunya SPTJM tadi apa curah keterangan.”

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Sei Jang, proses pengumpulan data dan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) sering kali melibatkan banyak pihak, seperti pendamping, RT, RW, dan Kelurahan. Salah satu responden mengungkapkan bahwa beliau mengetahui dirinya sebagai penerima PKH melalui pendamping, yang menyatakan bahwa data beliau terdaftar di basis data pendamping karena sebelumnya belum pernah mengambil bantuan tersebut. Responden juga mengungkapkan bahwa proses pendataan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk RT dan Kelurahan, yang membantu dalam mengusulkan dan mendeteksi kebutuhan bantuan seperti SPTJM (Surat Pernyataan Tidak Mampu) untuk keperluan pendidikan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterlibatan berbagai pihak dalam proses pendataan, masih diperlukan upaya untuk memastikan kejelasan dan akurasi data agar setiap penerima bantuan dapat sepenuhnya memahami status mereka dan manfaat yang didapatkan.

Ketepatan Menentukan Tujuan

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung bersyarat. Berdasarkan penelitian ini, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena banyak masyarakat yang merasa bahwa bantuan ini tidak cukup untuk mengatasi masalah mendasar mereka, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan tujuan

program PKH perlu dievaluasi ulang agar lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin di Kelurahan Sei Jang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

“Program lain banyak sih yang diinterogaskan, kayak pembantuan pembekalan yang dikasih untuk lansia biasanya makanan diberikan juga oleh masyarakat. Dan itu juga dibantu dengan penambahan PKH banyak program program dari dinsos yang menyambung dengan PKH, kayak bantuan sembako dari pusat dan itu juga bersama PKH. Dimana ada penduduk PKH dapat juga bantuan banyak bantuan bantuan dinsos yang terputus.”

Dan Ibu Nia juga menjawab:

“Harusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat karena masyarakat memang perlu bantuan, bantuan sekolah untuk Menyesuaikan itu kita ngasih nya dalam bentuk uang, kita gak ngasih bantuan lain jadi langsung dibayar dari sekolah. Jadi masyarakat bisa memutuskan sendiri bantuan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara, program-program yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk memberikan bantuan yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain bantuan utama melalui PKH, terdapat berbagai program lain yang disinergikan, seperti pembekalan untuk lansia, bantuan sembako, serta bantuan dari pusat yang juga dikaitkan dengan PKH. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penduduk yang terdaftar dalam PKH dapat mengakses berbagai bentuk bantuan sosial yang mendukung kesejahteraan mereka.

Dinas Sosial menegaskan pentingnya penyesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat, karena setiap keluarga memiliki tantangan yang berbeda-beda. Contohnya, dalam hal bantuan pendidikan, bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai yang langsung digunakan untuk membayar kebutuhan sekolah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fleksibel dalam mengatur bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tanpa harus menerima bantuan dalam bentuk barang atau layanan yang mungkin tidak sesuai.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program, memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang Tokoh Masyarakat mengenai Ketepatan Penentuan Waktu dalam penyaluran PKH diperoleh jawaban:

“Iye udah, nak mcm mane lagi kan, kite ikut aja sesuai dgn prosedur, yaa Terima ajaaa”

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat penerima PKH di Kelurahan Sei Jang, sebagian besar memahami kewajiban dan aturan yang harus dipenuhi dalam program ini.

Mereka menyatakan bahwa meskipun terkadang ada kebingungan awal, namun pada akhirnya mereka mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa tantangan dalam memahami setiap detail aturan, masyarakat secara umum mengikuti proses yang ada sesuai dengan arahan yang diberikan. Namun, tetap diperlukan pemantauan dan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengoptimalkan manfaat dari program tersebut secara lebih efektif.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana PKH berhasil menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Meskipun mayoritas penerima manfaat merasa terbantu, ada juga yang merasa bahwa masih ada keluarga lain yang lebih membutuhkan bantuan namun belum terjangkau. Ketepatan sasaran ini menjadi hal yang krusial dalam menentukan keberhasilan PKH, dan oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem pendataan dan penentuan penerima bantuan agar program ini lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku staf Dinas Sosial dalam bidang PKH.

“Kita ngak punya target jadi memang beberapa masyarakat yang membutuhkan nanti diusulkan siapa aja yang membutuhkan.”

Berdasarkan hasil wawancara, program PKH di Kelurahan Sei Jang tidak memiliki target tetap. Sebaliknya, masyarakat yang membutuhkan akan diusulkan berdasarkan kebutuhan yang muncul. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menerima, memverifikasi, dan mengusulkan individu atau keluarga yang layak menerima bantuan tersebut. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, seperti kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, Dinas Sosial berupaya memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan mempertimbangkan kriteria yang berlaku. Meskipun tanpa target tertentu, penyeleksian ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa bantuan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat yang paling memerlukan

Dan Ibu Nia juga menjawab:

“Kalau kendala paling berurusan sama pihak penyalur kayak baru baru ini untuk tahap akhir merka harus datang lagi membuat rekening baru dan bikin lagi buku rekening baru. Itu yang jadi masalah bagi masyarakat sementara akhir tahun bisnya kita banty, kalau proses mayarakat kita juga tidak bisa apa apa karena itu kan banyak aplikasi, jadi semua dengan aplikasi kalau tiba-tiba dia terkeluar kita ngak bisa apa apa itu keluar sendiri dari pusat.”

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program PKH di Kelurahan Sei Jang adalah terkait proses penyaluran bantuan yang melibatkan banyak tahapan, seperti pembuatan rekening baru atau buku rekening baru. Hal ini sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama ketika mereka harus kembali mengurus hal tersebut di tahap akhir.

Selain itu, proses yang bergantung pada aplikasi juga menimbulkan tantangan, karena jika ada kesalahan atau kegagalan sistem dari pusat, Dinas Sosial tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi masalah tersebut. Dinas Sosial hanya dapat membantu memfasilitasi dan memberikan arahan, namun keputusan akhir dan solusi harus menunggu penanganan dari pusat yang mengatur sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah agar proses ini dapat berjalan lebih lancar tanpa menghambat masyarakat yang membutuhkan bantuan.

5. KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan yang telah menjadi tantangan global, termasuk di Indonesia. Melalui berbagai program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial yang terintegrasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data dari Kelurahan Sei Jang dan Kota Tanjungpinang menunjukkan dinamika signifikan dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Program PKH berhasil menurunkan angka kemiskinan secara bertahap, tetapi efektivitas program ini harus terus dievaluasi menggunakan indikator yang tepat, seperti yang diusulkan Makmur (2015), untuk memastikan tujuan kesejahteraan sosial tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sei Jang terbukti memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat waktu, dan jumlah bantuan sering kali belum mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun prosedur penyaluran sudah cukup terorganisir, kendala geografis dan data penerima yang kurang akurat masih menjadi hambatan.

Pengukuran dampak program belum menunjukkan perubahan signifikan dalam jangka panjang, terutama terkait peningkatan kesejahteraan ekonomi. Penentuan penerima manfaat juga masih perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat umumnya mematuhi aturan program, namun masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, khususnya

dalam pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, PKH sudah berjalan cukup baik, namun perlu peningkatan dalam hal ketepatan sasaran, efisiensi pelaksanaan, dan penyesuaian tujuan program dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Saran

Setelah mendapatkan dan menganalisis hasil penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sei Jang, Kota Tanjungpinang, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran untuk meningkatkan partisipasi serta efektivitas program tersebut. Berikut beberapa saran yang dapat diimplementasikan:

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Hendaknya masyarakat Kelurahan Sei Jang dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam program PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran ini melalui sosialisasi yang lebih intensif.

Fasilitasi Informasi

Penyelenggara program PKH perlu lebih memperhatikan kelompok masyarakat yang masih kurang memahami sistem yang berlaku, sehingga dapat memberikan pendampingan yang lebih baik agar mereka dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

Fasilitas Aksesibilitas

Hendaknya Pemerintah menyediakan fasilitas atau sistem yang mendukung agar masyarakat yang terkendala oleh jarak atau faktor lain seperti pekerjaan dan pendidikan, tetap dapat berpartisipasi dalam program PKH dengan mudah dan tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat miskin kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Bachtiar Chamsyah. (2006). Teologi penanggulangan kemiskinan. RM-Books.
- Daromoredjo, S. K., & Simatupang, P. (2003). Produksi domestik bruto, harga, dan kemiskinan. *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 51(3), 191–324.
- Handyaningrat, S. (1994). Pengantar ilmu administrasi dan manajemen. CV Masaagung.
- Kartasmita, G. (2006). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Pustaka Cakra.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021–2024.
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. Pembaharuan.
- Makmur. (2015). Efektivitas kebijakan kelembagaan publik. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Oman, S. (2016). Konsep dan teori gerakan sosial. Intrans Publishing.
- Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008. (2008). Kementerian Sosial RI.
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2021). Statistik Tanjungpinang dalam angka 2021.
- Prichatin, A. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga: Studi kasus pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Rahim, R. (2020). Kerangka pikir dalam penelitian. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 44.
- Sumedi, & Supardi. (2004). Kemiskinan di Indonesia: Suatu fenomena ekonomi. Icaserd Working Paper No. 21, Pusat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian.
- Susanto, T. (2023). Angka kemiskinan ekstrem di Tanjungpinang justru turun signifikan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- Ulfah, B. R. M. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tiwugalih Kota Praya. *Media Bina Ilmiah*, 17(6), 1029–1036.
- Urika, T. A. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pandak Bantul (Bachelor thesis, Fakultas Ilmu Sosial, Karangmalang Yogyakarta).